

LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Kasus Perundungan di Lingkungan Sekolah pada Media Online *Kompas.com*

Siswa SD di Medan Dihukum Guru Belajar di Lantai karena Belum Bayar SPP



Gambar 1. Berita K1

Kamelia (38) ibu dari siswa SD kelas IV di Medan yang viral disuruh gurunya belajar di Lantai saat diwawancarai di rumahnya, Jumat (10/1/2025). (Rahmat Utomo/Kompas.com)

MEDAN, KOMPAS.com - MA, seorang siswa kelas IV SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara, dihukum gurunya berinisial H belajar di lantai, hanya karena belum membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Video siswa malang itu belajar di lantai kemudian viral di media sosial dan menjadi perbincangan di media sosial.

Di video yang diunggah akun Instagram @medanheadlines.news, tampak ibu dari siswa SD tersebut, Kamelia (38), mendatangi sekolah dan menyaksikan langsung anaknya duduk di lantai.

Baca juga: [Iran Ungkap 10 Syarat Gencatan Senjata dengan AS-Israel, Ini Daftarnya](#)

Di tempat itu, Kamelia tampak marah dengan wali murid.

"Ibu orang yang berpendidikan, ibu jauh lebih berpendidikan dari saya, setidaknya jangan buat anak saya kayak binatang kayak gini," ujar Kamelia sambil menunjuk anaknya yang sedang duduk di lantai.

Diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjend Katamso, Kota [Medan](#), Kamelia menjelaskan duduk perkara peristiwa memilukan yang menimpa anaknya.

Baca juga: [Lucky Hakim Tolak 3 Karung Uang Koin dari Petambak Indramayu: Kalau Saya Terima, Itu Gratifikasi](#)

Kamelia mengakui anaknya menunggak uang sekolah hingga tiga bulan karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun 2024 belum cair.

Sementara, dia terdesak kebutuhan ekonomi mengingat suaminya hanya bekerja sebagai tukang bangunan.

Karena belum membayar uang sekolah selama tiga bulan, saat pembagian rapot di akhir tahun, anaknya juga tidak bisa menerima rapot.

Baca juga: [Rusia dan China Veto Resolusi PBB soal Selat Hormuz, Sebut Serangan AS-Israel Biang Krisis](#)

Kamelia sempat meminta dispensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah.

Kemudian, sebelum anaknya masuk sekolah, wali murid mengumumkan di grup WhatsApp orangtua murid bahwa siswa yang belum membayar uang sekolah tidak diperkenankan belajar.

"Saya pikir itu cuma kata-kata saja," ujar Kamelia kepada wartawan di rumahnya, Sabtu (10/1/2025).

Baca juga: [Selat Hormuz Dibuka 2 Minggu Selama Gencatan Senjata AS-Iran](#)

Kamelia mengatakan, rencananya dia mau membayar uang sekolah pada Rabu (8/1/2025).

Dia ingin menjual ponsel terlebih dahulu untuk biaya sekolah anaknya.

Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena sudah dua hari dihukum belajar di lantai oleh gurunya, dari jam masuk sekolah pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Baca juga: [Politik Ketakutan Donald Trump](#)

"Malu loh Mak ke sekolah. Kenapa malu? (Saya) disuruh duduk di semen, gara-gara belum ambil rapot lah sejak Senin sampai Selasa'," ujar Kamelia menirukan ucapan anaknya.

Kala itu, Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu (8/1/2025), dia langsung datang ke sekolah.

"Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, 'ambilah rapotnya, Bu. Kasihan kali (MA) duduk di semen kayak pengemis'. Di situ saya sempat nangis, ya Allah, kok kayak gini kali," ujar Kamelia.

Baca juga: [Gencatan Senjata Iran-Amerika Cakup Lebanon, Israel Dilarang Serang](#)

Lalu, saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi.

"Saya bilang ke anak saya, 'kejam kali guru mu, nak'. Baru datang wali kelasnya dan langsung bilang, 'peraturannya kalau belum bayar tidak dibenarkan sekolah'," ujar Kamelia menirukan ucapan wali murid anaknya.

Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang.

Baca juga: [Iran Sepakat Gencatan Senjata dengan AS, Tegaskan Perang Belum Berakhir](#)

"'Anak ibu sudah saya suruh pulang, tetapi dia tidak mau pulang'. Jadi dia tidak boleh belajar? Kata saya, terus saya bilang, 'dulu saya sekolah, tapi tidak gini juga caranya, dihukum kayak gini'," ujar Kamelia menceritakan perdebatan dengan wali murid anaknya.

Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi.

Kamelia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah.

Baca juga: [Anggaran Renovasi Rumah Dinas Capai Rp 25M, Gubernur Kaltim: Toilet, TV, Sofa Sudah Tak Layak](#)

"Saya tidak tahu kata kepala sekolahnya," ujar Kamelia menirukan ucapan kepala sekolah.

Penjelasan Kepala Sekolah

Kepala Sekolah Abdi Sukma, Juli Sari, mengungkapkan bahwa awalnya ia tidak mengetahui bahwa siswa kelas IV SD tersebut diminta duduk di lantai saat proses belajar berlangsung di sekolah.

Juli menegaskan bahwa pihak yayasan tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan siswa yang belum membayar SPP untuk belajar di lantai.

Baca juga: [\[BREAKING NEWS\] Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang AS-Iran 2 Pekan](#)

"Jadi sebenarnya ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukkan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis," kata dia dikutip dari *Tribun Medan*, Jumat.

Diakui Juli, siswa tersebut belum melunasi SPP dan karena itu belum dapat menerima rapor.

"Sebenarnya anak itu tidak menerima rapor karena belum melunasi SPP. Tapi tidak jadi permasalahan sebenarnya dan tetap bisa mengikuti pelajaran," terangnya.

Baca juga: [Massa BEM UI Demo di Patung Kuda Hari ini, Seribuan Personel Disiagakan](#)

Hanya saja, kata Juli, miskomunikasi terjadi antara dirinya dan wali kelas.

Menurutnya, wali kelas tersebut membuat peraturan sendiri tanpa ada konfirmasi ke dia terlebih dahulu.

"Wali kelasnya membuat peraturan sendiri di kelasnya bahwa kalau anak tidak ada menerima rapor, tidak boleh menerima pelajaran dan mendudukkan siswa tersebut di lantai saat pelajaran berlangsung, tanpa kompromi dengan pihak sekolah," kata dia.

Baca juga: [Cerita Aflaha, Siswa Purwokerto Penghafal 30 Juz yang Diterima di 10 Univ Dunia](#)

Juli mengaku sudah memanggil wali murid dan wali kelas secara langsung.

Sebagai kepala sekolah, dia juga sudah meminta maaf kepada orangtua siswa tersebut.

"Saya sebagai kepala sekolah sudah memohon maaf sama orangtua, sudah selesai sebenarnya permasalahan ini," kata Juli.

Baca juga: [Harga Plastik Naik, Pedagang di Jatim Putar Otak: Jual Pentol Pakai Lidi hingga Tekan Keuntungan](#)

Untuk tindakan tegas terhadap wali kelas, kata Juli, pihak sekolah belum bisa memutuskan secara langsung.

Senin pekan depan, sekolah akan melakukan rapat dengan ketua yayasan dan bendahara untuk memutuskan sanksi kepada wali kelas tersebut.

Sebagian artikel ini telah tayang di [Tribun-Medan.com](#) dengan judul [Tak Tahu Ada Siswa yang Didudukkan di Lantai karena Belum Bayar SPP, Ini Kata Kepsek SD Abdi Sukma](#)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. [Gabung KOMPAS.com Plus sekarang](#)

Viral Video Kekerasan Siswi di Temanggung, Ini Pemicunya



Gambar 2. Berita K2

ilustrasi bullying.(canva.com)

TEMANGGUNG, KOMPAS.com – Sebuah video viral memperlihatkan aksi kekerasan yang melibatkan pelajar perempuan di Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Video berdurasi 18 detik itu tersebar di berbagai platform media sosial, baik dalam versi penuh sensor maupun tanpa sensor.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten [Temanggung](#), Agus Sujarwo, menjelaskan insiden tersebut melibatkan lima siswi kelas IX dari SMP N 1 Kranggan pada Selasa (14/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB.

Saat itu, kelima siswi sedang menunggu hujan reda di halaman sekolah. Namun, situasi berubah menjadi konflik seperti yang terekam dalam video.

“Diduga kejadian dipicu saling ejek antarsiswi. Guru BK sudah mendamaikan mereka dan meminta mereka pulang secara bergantian untuk mencegah insiden serupa,” ujar Agus, Rabu (15/1/2025).

Baca juga: [Siswa SD Dihukum Belajar di Lantai karena Menunggak SPP, Pakar Sebut Termasuk Bullying](#)

Dinas Pendidikan akan melakukan investigasi dan mendorong mediasi kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini.

Agus menyebut ada dua siswi sebagai korban dan tiga siswi sebagai terduga pelaku. Orang tua salah satu korban telah melaporkan kasus ini ke polisi.

Hingga berita ini ditulis, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung AKP Didik Tri Wibowo belum memberikan keterangan terkait laporan tersebut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. [Gabung KOMPAS.com Plus sekarang](#)



Santri 14 Tahun Dikeroyok Senior di Pondok Pesantren Banyuwangi hingga Kritis



Gambar 3. Berita K3

Ilustrasi tewas. Seorang santri berusia 14 tahun, AR, mengalami luka serius dan kini dalam kondisi kritis setelah menjadi korban pengeroyokan oleh enam orang seniornya di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. (SHUTTERSTOCK)

KOMPAS.com - Seorang santri berusia 14 tahun, AR, mengalami luka serius dan kini dalam kondisi kritis setelah menjadi korban pengeroyokan oleh enam orang seniornya di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Insiden ini terjadi pada Sabtu (28/12/2024), saat AR yang berasal dari Kabupaten Buleleng, Bali, ditemukan tak sadarkan diri.

Koordinator Pelayanan Medis RSUD Blambangan, dr. Ayyub Erdiyanto, mengungkapkan bahwa korban tiba di rumah sakit sekitar pukul 03.00 WIB dengan kondisi penurunan kesadaran.

"Korban yang datang dengan kondisi penurunan kesadaran itu pun langsung dikonsultasikan dengan dokter bedah saraf," kata Ayyub.

Baca juga: [2 Santri yang Hilang Terseret Ombak di Pantai Jorong Ditemukan Tewas](#)

Setelah dilakukan CT scan, ditemukan adanya pendarahan otak di sisi kiri kepala korban, yang meliputi bagian depan hingga belakang, serta otak yang dalam kondisi bengkak.

"Karena ada beberapa luka (di kepala), langsung dilakukan CT scan dan ditemukan ada pendarahan otak," ujar Ayyub.

Segara tim medis melakukan operasi darurat untuk mengatasi pendarahan tersebut.

Baca juga: [Rusia dan China Veto Resolusi PBB soal Selat Hormuz, Sebut Serangan AS-Israel Biang Krisis](#)

Meskipun operasi telah dilakukan, kondisi AR masih sangat kritis. Setelah dioperasi, korban dipindahkan ke ruang ICU.

Hingga hari kelima pascaoperasi, korban masih belum sadarkan diri dan kesadarannya tetap dalam kondisi buruk.

"Jadi ini masih masa kritis. Mohon didoakan semoga pasien mampu untuk semakin membaik," tambah Ayyub.

Baca juga: [Update Kondisi Santri di Boyolali Korban Penganiayaan hingga Alami Luka Bakar](#)

Selain luka di kepala, AR juga menderita lebam di beberapa bagian tubuh, seperti di lengan dan dada.

Visum terhadap korban telah dilakukan, namun hasilnya menjadi kewenangan pihak kepolisian.

Kapolresta [Banyuwangi](#), Kombes Pol. Rama Samtama Putra, menjelaskan bahwa "luka-lukanya di sekujur badan. Di muka ada lebam dan lainnya."

Baca juga: [Iran Ungkap 10 Svarat Gencatan Senjata dengan AS-Israel, Ini Daftarnya](#)

Ia juga menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung, dengan hasil visum yang akan menjadi dasar untuk langkah lebih lanjut.

Kombes Pol. Rama menambahkan bahwa korban dikeroyok oleh enam orang seniornya.

Keempat pelaku di antaranya berusia dewasa, yakni HR (17), IJ (18), MR (19), dan S (18), sementara dua lainnya masih di bawah umur, yaitu WA (15) dan Z (18).

"Seluruhnya telah kami tetapkan sebagai tersangka," tegas Rama.

Baca juga: [Kronologi Santri di Boyolali Dibakar Pakai Bensin oleh Tamu Pondok, Berawal dari HP Hilang](#)

Polisi juga masih mendalami peran masing-masing tersangka dalam pengeroyokan ini dan motif di balik peristiwa tersebut. Selain itu, pihak kepolisian sedang menyelidiki apakah ada keterlibatan pihak pondok pesantren dalam kejadian ini.

"Apakah pihak pesantren mengetahui atau bisa dimintai pertanggungjawaban, itu masih pendalaman," ujar Rama.

Polisi berjanji akan mengungkapkan detail kasus ini ke publik setelah pemeriksaan selesai.

Bocah Korban Pelecehan-Perundungan Asal Garut Akan Kembali Jalani Visum Ulang



Gambar 4. Berita K4

Ilustrasi perundungan di sekolah. (Dok. Shutterstock/ TOP-STOCKER)

BANDUNG, KOMPAS.com - D (12), bocah korban dugaan pelecehan seksual dan perundungan oleh teman sebaya asal Kecamatan Cibatuh, Kabupaten Garut, akan kembali menjalani visum ulang.

Pasalnya, visum pertama yang dijalani korban pada Kamis (9/10/2025) di Rumah Sakit dr Slamet Garut gagal dilakukan karena kondisi korban yang drop.

Kuasa hukum korban, Muhamad Nurdin, mengatakan, [visum ulang](#) terhadap D direncanakan akan dilakukan pada pekan depan, sekaligus melengkapi berkas laporan yang dilakukan oleh orangtua korban.

Baca juga: [Dinas Perlindungan Anak Jabar Beri Pendampingan pada Bocah Garut Korban Pelecehan dan Perundungan](#)

"Rabu depan, kami akan ke Polres Garut untuk disposisi penanganannya langsung oleh Polda Jabar," ujarnya saat dihubungi, Jumat (10/1/2025).

Dia mengungkapkan, terduga pelaku yang melakukan pelecehan dan [perundungan](#) terhadap korban D berjumlah empat orang.

Meski identitas terduga pelaku sudah diketahui, saat ini Polres Garut belum melakukan penahanan karena usia keempatnya masih di bawah umur.

"Karena masih anak di bawah umur atau *gimana*, nanti kami diskusi dulu. Misalnya kan keempat pelaku ini semuanya anak di bawah umur, nah ini kan nanti kami penentuan apakah harus kena penerapan atau *gimana*," tutur Nurdin.

Nurdin menambahkan, pihaknya telah memberikan perlindungan terhadap korban dan juga keluarganya.

Baca juga: [Polres Garut Tangani Kasus Remaja yang Alami Pelecehan dan Perundungan sejak TK](#)

Ini dilakukan guna menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, semisal intimidasi dan lain sebagainya.

Pasalnya, alasan orangtua korban memutuskan untuk bungkam atas kasus yang menimpa anaknya tersebut karena mendapatkan intimidasi dari keluarga pelaku dan perangkat desa tempat tinggalnya di Garut.

"Diancam dan lain-lain, pelaku ini sempat membuat pernyataan secara tertulis juga disaksikan kepala desa. Dalam mediasi tersebut, supaya tidak dilaporkan ke polisi, akhirnya keluarga ibu korban itu buka suara," katanya.

Sebelumnya diberitakan, bocah perempuan berinisial D (12) asal Kabupaten Garut, Jawa Barat, diduga mengalami [pelecehan seksual](#) dan perundungan yang dilakukan oleh temannya selama bertahun-tahun.

Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami trauma hingga kerusakan pada organ intim akibat infeksi yang disebabkan pelecehan seksual sejak Taman Kanak-kanak (TK).

Orangtua korban, L (32), menceritakan, anaknya menjadi korban pelecehan seksual dan perundungan oleh sejumlah teman mainnya. Aksi itu pun dilakukan berulang hingga korban duduk di kelas 4 sekolah dasar (SD).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. [Gabung KOMPAS.com Plus sekarang](#)



Siswa Belajar di Lantai gegara Tunggak SPP, Pakar Duga Guru Dapat Tekanan



Gambar 5. Berita D1

Foto: Siswa SD Swasta di Medan disuruh belajar di lantai karena tunggak uang sekolah. (Dok. Istimewa)

Jakarta -

Dunia pendidikan diramaikan dengan kasus guru yang menghukum siswa SD Swasta Abdi Sukma Kota Medan karena menunggak pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Ketua Guru Belajar Foundation memberikan pendapatnya.

Beberapa waktu ini, ramai isu seorang guru bernama Haryati yang menghukum siswa karena menunggak pembayaran SPP. Dalam video peristiwa yang terjadi pada Rabu (8/1/2025), siswa tersebut terlihat duduk di lantai selama kegiatan belajar-mengajar. Setelah melalui pertimbangan, Yayasan Sukma Abdi Medan mengumumkan pemberian sanksi skorsing pada Haryati.

Melihat kasus itu, Bukik Setiawan selaku Ketua Guru Belajar Foundation mempertanyakan pengelolaan manajemen yayasan. Pasalnya, urusan administrasi seperti pembayaran SPP seharusnya bukan ranah guru.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Muara persoalan ini adalah tata kelola satuan pendidikan. Penagihan SPP bukan tanggung jawab guru. Guru bertanggung jawab mendidik murid, bukan mengelola keuangan, " kata Bukik dalam keterangan resmi yang diterima detikEdu, Kamis (16/1/2025).

Dugaan Guru Ditekan Pihak Yayasan

Bukik menduga adanya tekanan dari pihak yayasan yang mendorong guru untuk ikut bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran SPP siswa. Pada akhirnya, desakan ini membuat guru memberikan tekanan kepada siswa.

Menurut Bukik, pelunasan SPP seharusnya hanya terjadi antara orang tua dengan sekolah atau yayasan. Bukan dengan guru ke siswa. Apabila ditemukan kesulitan pembayaran, yayasan seharusnya mengambil langkah proaktif.

"Apabila ternyata memang ada kesulitan dari pihak orang tua, manajemen sekolah atau yayasan yang mengambil langkah proaktif untuk mencari solusi. Bukan kemudian membebankan tanggung jawab ini pada guru," lanjutnya.

Lebih lanjut, Bukik mengajak guru untuk tidak mengorbankan tugas pokok untuk melaksanakan tugas tambahan. Melalui kasus ini, beban tambahan yang tidak sesuai terbukti menciptakan ketidakharmonisan guru dengan siswa.

Selain itu, Bukik juga menegaskan pentingnya yayasan sekolah untuk membedakan tugas pengajaran dan administrasi yang tidak ada kaitannya dengan guru. Sekolah perlu memastikan agar guru bekerja di lingkungan yang mendukung.

Kemendikdasmen Kunjungi Sekolah Terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui tim Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumatera Utara telah melakukan klarifikasi ke SD swasta Abdi Sukma Kota Medan perihal siswa yang mendapat hukuman belajar di lantai.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto PhD mengungkapkan laporan dari tim menyebutkan sebenarnya yang belum dibayarkan orang tua siswa bukan uang sekolah.

"Ternyata ada tunggakan bukan uang sekolah, tapi iuran tambahan karena itu kan sekolah swasta," ujar Gogot saat dihubungi detikedu, Sabtu (11/1/2024).

Gogot menyatakan seharusnya prosedur yang ditempuh yayasan dan sekolah adalah melakukan komunikasi dengan orang tua, bukan siswa.

"SOP seharusnya memang bersurat ke orang tua karena yang membayar orang tua. Anak kan tahunya sekolah. Hal ini yang sangat disayangkan," ujar mantan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Korea Selatan itu.

Pihak yayasan yang menaungi sekolah tersebut juga mengaku tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk menghukum keterlambatan pembayaran dengan belajar di lantai kelas.

"Hukuman itu inisiatif guru wali kelasnya," kata Gogot.

Sementara itu ketua yayasan yang menaungi SD tersebut, Ahmad Parlindungan, menyatakan pihaknya telah memberi sanksi pada guru bersangkutan. Guru tersebut kini dirumahkan.

"Gurunya ya kita rumahkan dulu lah, tenangkan dirinya," ucapnya, dilansir detikSumut, dikutip Kamis (16/1/2025).

"Sudah kita berikan juga sanksi, setelah viral suasana tidak kondusif, jadi saya bilang mulai hari Senin istirahat di rumah sampai tenang, sampai kondusif, nanti kelanjutannya disampaikan," imbuh Ahmad Parlindungan.

Korban Kasus Perundungan Siswi SMP Temanggung Masih Dirawat Inap di RS



Gambar 6. Berita D2

Ilustrasi bullying siswi SMP di Temanggung. (Foto: Dok. Shutterstock)

Temanggung -

Kasus perundungan atau *bullying* siswi SMP di Temanggung saat ini masih diusut polisi. Kini korban dan pelaku perundungan mendapat pendampingan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Temanggung.

"Korban sampai sekarang belum dapat dimintai keterangan karena yang bersangkutan masih rawat inap di salah satu rumah sakit di Temanggung," ujar Kasat Reskrim Polres Temanggung, AKP Didik Tri Wibowo saat ditemui di Mapolres Temanggung, Kecamatan Temanggung, Kamis (16/1/2025).

"Sampai saat ini baru 2 saksi dari pihak guru dan dari orang tua korban (yang dimintai keterangan,red)," sambung Didik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Didik mengaku menerima laporan terkait perundungan itu dari salah satu orang tua korban, Rabu (15/1) kemarin.

"Sementara yang melaporkan satu korban. Nanti dalam penyelidikan seperti apa, nanti pengembangan kita sampaikan lebih lanjut. Terduga pelaku dalam penyelidikan masih sebanyak 3 terduga pelaku anak. Semua masih di bawah umur," jelas dia.

Dia menerangkan kasus ini nantinya akan dilimpahkan ke Polres Temanggung.

"Karena terduga pelaku anak, kemudian dilimpahkan ke Sat Reskrim Polres Temanggung dan yang menangani Unit PPA," kata Didik.

Sementara itu, Dindikpora Kabupaten Temanggung mengaku sudah menengok korban di rumah sakit. Pihak Dindikpora datang bersama perwakilan guru.

"Kami bersama guru BK dan salah satu guru sudah mengunjungi di rumah sakit untuk memberikan semangat bagi anak. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang

mengkhawatirkan bagi si anak karena tinggal menunggu observasi," kata Kepala Dindikpora Kabupaten Temanggung, Agus Sujarwo saat ditemui di kantornya, Kendalsari, Purworejo.

Agus menerangkan pendampingan terhadap korban maupun pelaku perundungan tidak hanya dilakukan sekolah, tapi juga dinas. Pihaknya juga mendengarkan keterangan dari terduga pelaku.

"Buktinya kemarin (Rabu), kita sama langsung datang ke Polsek untuk sama-sama mendengar apa yang disampaikan (saat lapor). Termasuk permintaan keterangan," kata Agus.

"Kemudian datang ke RS untuk melihat kondisi langsung dari terduga korban dan juga kepada anak-anak yang lain. Kita mencoba mengunjungi karena ini memang dua-duanya (terduga korban dan terduga pelaku) masih posisinya anak-anak. Ini bukti kita melakukan pendampingan," sambung Agus.

Kasus dugaan perundungan di salah satu SMP Temanggung ini melibatkan lima siswi. Dua di antaranya korban perundungan.

"Dari 5 anak ini teridentifikasi 2 di antaranya terduga korban. Kemudian 3 anak terduga pelakunya," kata Agus.

Agus menuturkan orang tua salah satu korban sudah melaporkan peristiwa dugaan perundungan ini di Polsek Kranggan, Rabu (15/1). Pihaknya pun berharap kasus ini bisa diselesaikan lewat mediasi, mengingat baik terduga pelaku maupun korban masih berusia anak.

"(Langkah Dindikpora) Kita minta guru segera mengundang dari pihak orang tua dari wali murid yang terlibat kejadian tersebut. Kita berharap untuk bisa dimediasi, diselesaikan secara kekeluargaan. Kita berharap bisa dilakukan *restorative justice* mengingat ini masih anak-anak sekolah," pinta Agus.



Tragedi Santri Asal Bali Koma 6 Hari hingga Tewas Usai Dikeroyok Senior



Gambar 7. Berita D3

Jenazah santri asal Buleleng, Bali korban pengeroyokan senior dipulangkan ke Bali.
(Foto: Eka Rimawati/detikJatim)

Banyuwangi -

Santri asal Buleleng, Bali berinisial AR (14) itu 6 hari dirawat di ICU RSUD Blambangan dalam keadaan koma. Kedua ortunya setia menunggu di ICU dan kerap tertunduk khushyuk dengan bibir yang bergerak-gerak, dengan mata sembab yang lebih banyak terpejam. Doa terus mereka panjatkan untuk keselamatan anaknya yang menjadi korban penganiayaan.

AR menjadi korban perundungan oleh seniornya di Ponpes Nurul Abror Al-Robbaniyin Alasbuluh, Banyuwangi. Santri yang belum setahun di ponpes itu tak berdaya menghadapi 6 senior yang mengeroyoknya di luar jam pelajaran. Peristiwa mengerikan terhadap AR yang duduk di kelas 9 itu terjadi pada 27 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB.

"Penganiayaan itu terjadi di dalam lingkungan pondok," kata Kapolresta Banyuwangi Kombes Rama Samtama Putra.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ayyub Erdianto, Koordinator Pelayanan Publik RSUD Blambangan mengungkapkan saat tiba di RS pada 28 Desember 2024 pukul 03.00 WIB, kondisi AR sudah mengalami keparahan dengan kondisi nyaris koma.

"Datang dengan kondisi hampir koma di UGD langsung kami CT Scan karena ada bekas luka di kepala dan hasilnya ada pendarahan otak di bagian kiri depan sampai belakang," kata Ayyub, Kamis (2/1/2025).

Setelah melihat kondisi itu, pihak RSUD segera melakukan pertolongan. Dokter bedah syaraf langsung memutuskan untuk melakukan langkah evakuasi otak melalui tindakan operasi.

"Langsung penindakan pembedahan Cito (Craniotomy) untuk membuat rongga pada kepala dengan membuka batok kepala agar ada ruang bagi otak karena ada pembengkakan dan mengeluarkan pendarahan," tegas Ayyub.

Sayangnya, AR yang dinyatakan koma dengan status mati batang otak (MBO) dengan berbagai peralatan yang terpasang mulai dari ventilator hingga air warmer blanket dinyatakan meninggal usai operasi herniasi batang otak imbas pendarahan di tengkorak.

AR dinyatakan meninggal pada pukul 13.30 WIB di ruang ICU RSUD Blambangan, Banyuwangi. Jenazahnya dikebumikan di Buleleng Bali oleh kedua orang tuanya. Pemkab Banyuwangi pun turun tangan menanggung semua biaya pengobatan di RS termasuk pemulangan jenazah ke tempat kelahirannya.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Rama Samtama Putra menegaskan kematian AR tidak menghentikan proses hukum. Polisi justru melakukan perubahan pada penentuan pasal yang akan disangkakan kepada para pelaku.

Setelah mendapatkan laporan, polisi telah mengamankan dan menetapkan 6 santri senior korban sebagai tersangka dugaan pengeroyokan. Keenamnya yakni HR (17), IJ (18), MR (19), S (18), WA (15) dan Z (18).

"Proses hukum masih berjalan terhadap para pelaku dari yang lalu sudah kita tetapkan tersangka dan juga dilakukan penahanan. Karena yang tadinya korban masih hidup sekarang dinyatakan meninggal maka agak berubah konstruksi hukumnya," kata Rama, Kamis (2/1/2025).

Mulanya para pelaku akan dijerat pasal 170 KUHP di mana pengeroyokan itu dilakukan bersama-sama mengakibatkan luka berat. Karena korban meninggal jeratan hukum dialihkan menjadi pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

Ancaman hukuman terhadap keenam senior korban yang telah ditetapkan tersangka juga meningkat dari sebelumnya paling lama penjara 9 tahun menjadi paling lama penjara 12 tahun.

Rama menambahkan terkait kematian korban pihak rumah sakit akan melengkapinya dengan hasil visum kematian. Sebelumnya pihaknya telah mendapatkan hasil visum mengenai penyebab koma yang dialami korban.

"Hasil visum, ya, visum update, ya. Kemarin kan terkait korban masih terluka masih dirawat dan sekarang sudah meninggal. Maka tadi juga kami koordinasi dengan dokter yang menangani nanti akan dibuatkan semacam visum terkait dengan korban meninggal," katanya.

Menanti Jalan Terang Kasus Pelecehan Remaja Garut Oleh Kakak Kelas



Gambar 8. Berita D4

Pengakuan mengejutkan kali ini datang dari seorang gadis remaja berusia 12 tahun asal Garut, Jawa Barat (Jabar). Dia bercerita sudah menjadi korban pelecehan yang diduga dilakukan kakak kelasnya.

Berdasarkan ceritanya, insiden memilukan itu terjadi di Garut pada 2022 silam. Yang membuat kejadian ini begitu ironis, korban ditengarai dilecehkan pada bagian intimnya menggunakan sayuran terong oleh terduga pelakunya.

Kasusnya kemudian baru mencuat setelah pihak keluarga mau buka suara belum lama ini. Korban dalam pengakuannya, saat itu diduga dilecehkan saat berusia 10 tahun Ketika menyaksikan perlombaan 17 agustusan di kampung halaman.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pengakuannya korban didatangi tiga orang kakak kelasnya, perempuan juga, dan diduga melakukan aksi perundungan," ucap Kasat Reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo, Kamis (9/1/2025).

Selepas kejadian, korban dilaporkan mengalami trauma hingga memutuskan untuk pindah ke Bandung dengan tujuan menenangkan diri. Saat ini, kejadian itu sedang ditindaklanjuti dengan mengumpulkan saksi, termasuk meminta visum ke pihak rumah sakit.

Ternyata, kasus ini turut mendapat sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga pemerintah setempat. Sebab diketahui, korban maupun terduga pelakunya berstatus anak di bawah umur.

Ketua KPAID Tasikmalaya Ato Rinanto mengatakan, pihaknya turun tangan mendampingi para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Pasalnya semua yang terlibat masih berstatus sebagai anak.

"Selain korban, kami juga mendampingi anak yang melakukan (pelecehan). Karena semuanya masih berstatus sebagai anak," ungkap Ato kepada wartawan di Polres Garut,

Lampiran 3. Tabel Analisis *Framing* Berita Kasus Perundungan di Lingkungan Sekolah pada *Media Online Kompas.com*

Kode Berita : K1

Judul Berita : Siswa SD di Medan Dihukum Guru Belajar di Lantai karena Belum Bayar SPP

Unit yang Diamati	Hasil Temuan	Interpretasi
Struktur Sintaksis		
Headline	Siswa SD di Medan Dihukum Guru Belajar di Lantai karena Belum Bayar SPP	Headline pada berita K1 menggunakan bentuk kalimat pasif yang ditandai oleh penggunaan kata "dihukum". Dalam struktur kalimat tersebut, "Siswa SD di Medan" ditempatkan sebagai subjek, sedangkan "guru" berperan sebagai pelaku tindakan. Penempatan siswa sebagai subjek menyebabkan perhatian pembaca sejak awal diarahkan kepada siswa sebagai pihak yang menerima tindakan. Meskipun menggunakan kalimat pasif, pelaku tindakan tetap dihadirkan melalui penyebutan kata "guru". Kehadiran pelaku dalam struktur kalimat pasif menunjukkan bahwa media tidak hanya menyoroti pihak yang menerima tindakan, tetapi juga secara eksplisit mengidentifikasi pihak yang melakukan tindakan tersebut. Selain itu, penggunaan konjungsi subordinatif sebab "karena" menghubungkan tindakan hukuman dengan tunggakan pembayaran SPP sebagai alasan terjadinya peristiwa. Dengan demikian, struktur headline menempatkan siswa sebagai fokus utama pemberitaan sekaligus menampilkan guru sebagai pihak yang melakukan tindakan terhadap siswa.
Lead	MA, seorang siswa kelas IV SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara, dihukum gurunya berinisial H belajar di lantai, hanya karena belum membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).	Lead berita K1 diawali dengan penyebutan identitas korban secara rinci, yaitu inisial, jenjang pendidikan, nama sekolah, dan lokasi kejadian. Penempatan informasi tersebut pada awal lead menunjukkan bahwa

		korban menjadi fokus utama yang diperkenalkan kepada pembaca sejak awal pemberitaan. Selain itu, lead menggunakan bentuk kalimat pasif yang ditandai oleh kata “dihukum”, sehingga korban ditempatkan sebagai subjek kalimat, sedangkan guru ditampilkan sebagai pelaku tindakan melalui frasa “gurunya berinisial H”. Struktur tersebut mengarahkan perhatian pembaca pada siswa sebagai pihak yang menerima tindakan. Selanjutnya, penggunaan frasa “hanya karena” berfungsi sebagai penegas hubungan sebab yang menghubungkan hukuman dengan tunggakan pembayaran SPP. Dengan demikian, struktur lead menempatkan korban sebagai fokus utama pemberitaan sekaligus memperlihatkan hubungan antara korban, pelaku, dan penyebab terjadinya peristiwa.
Latar Informasi		Struktur ketiga adalah latar informasi. Pada berita K1 tidak ditemukan latar informasi. Hal ini karena media tidak menampilkan informasi pendukung atau informasi terdahulu yang berfungsi sebagai latar pemberitaan. Berita lebih berfokus pada penyajian peristiwa yang dialami korban, kronologi kejadian, serta tanggapan dari pihak terkait. Dengan demikian, media mengarahkan perhatian pembaca langsung pada peristiwa utama tanpa menghadirkan informasi tambahan sebagai latar pemberitaan.
Kutipan Sumber	• "Ibu orang yang berpendidikan, ibu jauh lebih berpendidikan dari saya, setidaknya jangan buat anak saya kayak binatang kayak gini," ujar Kamelia sambil menunjuk anaknya yang sedang duduk di lantai. • "Saya pikir itu cuma kata-kata saja," ujar Kamelia kepada wartawan di rumahnya, Sabtu (10/1/2025). • "Malu loh Mak ke sekolah. Kenapa malu? (Saya) disuruh duduk di semen, gara-gara belum ambil rapot lah sejak	Pada berita ini terdapat 11 kutipan dari dua narasumber, yaitu Kamelia selaku ibu korban dan Juli Sari selaku Kepala Sekolah SD Abdi Sukma. Pada bagian ini, kutipan sumber didominasi oleh Ibu korban dengan 7 kutipan mengenai kronologi peristiwa, situasi keuangan korban, dan kondisi psikologis anaknya. Sementara itu, Juli Sari hanya terdapat 4 kutipan sumber mengenai klarifikasi dan penegasan bahwa insiden tersebut

Senin sampai Selasa'," ujar Kamelia menirukan ucapan anaknya. • "Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, 'ambilah rapotnya, Bu. Kasihan kali (MA) duduk di semen kayak pengemis'. Di situ saya sempat nangis, ya Allah, kok kayak gini kali," ujar Kamelia. • "Saya bilang ke anak saya, 'kejam kali guru mu, nak'. Baru datang wali kelasnya dan langsung bilang, 'peraturannya kalau belum bayar tidak dibenarkan sekolah'," ujar Kamelia menirukan ucapan wali murid anaknya. • "Anak ibu sudah saya suruh pulang, tetapi dia tidak mau pulang'. Jadi dia tidak boleh belajar? Kata saya, terus saya bilang, 'dulu saya sekolah, tapi tidak gini juga caranya, dihukum kayak gini'," ujar Kamelia menceritakan perdebatan dengan wali murid anaknya. • "Saya tidak tahu kata kepala sekolahnya," ujar Kamelia menirukan ucapan kepala sekolah. • "Jadi sebenarnya ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukkan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis," kata dia dikutip dari Tribun Medan, Jumat. • "Sebenarnya anak itu tidak menerima rapor karena belum melunasi SPP. Tapi tidak jadi permasalahan sebenarnya dan tetap bisa mengikuti pelajaran," terangnya. • "Wali kelasnya membuat peraturan sendiri di kelasnya bahwa kalau anak tidak ada menerima rapor, tidak boleh menerima pelajaran dan mendudukkan siswa tersebut di lantai saat pelajaran berlangsung, tanpa kompromi dengan pihak sekolah," kata dia. • "Saya sebagai kepala sekolah sudah memohon maaf sama orangtua, sudah selesai sebenarnya permasalahan ini,"	disebabkan oleh kesalahpahaman dan bukan kebijakan institusional.
--	--

	kata Juli.	
Pernyataan	• Kamelia mengakui anaknya menunggak uang sekolah hingga tiga bulan karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun 2024 belum cair. • Kepala Sekolah Abdi Sukma, Juli Sari, mengungkapkan bahwa awalnya ia tidak mengetahui bahwa siswa kelas IV SD tersebut diminta duduk di lantai saat proses belajar berlangsung di sekolah. • Juli menegaskan bahwa pihak yayasan tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan siswa yang belum membayar SPP untuk belajar di lantai. • Diakui Juli, siswa tersebut belum melunasi SPP dan karena itu belum dapat menerima rapor.	Pada bagian pernyataan, media menyajikan pernyataan dari narasumber yang sama seperti stuktur kutipan sumber. Pernyataan yang ditampilkan didominasi oleh pihak institusi dengan 3 pernyataan mengenai klarifikasi dan rencana pemberian sanksi kepada pelaku. Di sisi lain, ibu korban hanya menyampaikan 1 pernyataan yang menjelaskan alasan keterlambatan pembayaran SPP.
Penutup	Senin pekan depan, sekolah akan melakukan rapat dengan ketua yayasan dan bendahara untuk memutuskan sanksi kepada wali kelas tersebut.	Struktur penutup menampilkan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pihak institusi, mengenai rencana pelaksanaan rapat untuk menentukan sanksi yang tepat bagi guru yang terlibat. Penutup tersebut menunjukkan upaya lembaga tersebut untuk menyelesaikan masalah.
Stuktur Skrip		
What	Apa yang dibahas dalam berita tersebut? Seorang siswa kelas IV dihukum belajar di lantai karena belum membayar SPP, lalu peristiwa tersebut viral.	Unsur <i>what</i> (apa) dalam berita ini adalah peristiwa seorang siswa yang dihukum duduk di lantai akibat belum membayar SPP. Peristiwa tersebut menjadi fokus utama yang ditonjolkan pada bagian headline dan lead. Hal ini dapat ditemukan dari kutipan berikut.
Who	Siapa yang dibahas pada berita tersebut? • MA (korban) • Kamelia (ibu korban) • Wali kelas (pelaku langsung) • Kepala sekolah • Pihak yayasan	Unsur <i>who</i> (siapa) melibatkan beberapa pihak yang ditampilkan dalam berita tersebut, diantaranya MA sebagai korban, Kamelia sebagai ibu korban, wali kelas sebagai pelaku, serta Juli Sari sebagai kepala sekolah.
Where	Dimana lokasi berita tersebut ? Peristiwa terjadi di SD Abdi Sukma, Kota Medan.	Unsur <i>where</i> (di mana) menunjukkan lokasi berlangsungnya peristiwa, yaitu di SD Abdi Sukma,

	Wawancara dilakukan di rumah Kamelia.	Kota Medan, Sumatera Utara. Informasi ini disampaikan secara jelas dalam <i>lead</i> berita.
When	Kapan peristiwa tersebut terjadi? Awal Januari 2025, berlangsung selama dua hari berturut-turut dari pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB. Penutup berita menyebut rencana rapat Senin pekan depan.	Unsur <i>when</i> (kapan) dalam berita ini tidak menyebutkan tanggal peristiwa. Namun, hal yang ditampilkan adalah durasi dan waktu berlangsungnya peristiwa, yaitu selama dua hari berturut-turut pada jam sekolah.
Why	- Kemudian, sebelum anaknya masuk sekolah, wali murid mengumumkan di grup WhatsApp orangtua murid bahwa siswa yang belum membayar uang sekolah tidak diperkenankan belajar. - Sementara, dia terdesak kebutuhan ekonomi mengingat suaminya hanya bekerja sebagai tukang bangunan. - Kamelia mengakui anaknya menunggak uang sekolah hingga tiga bulan karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun 2024 belum cair.	Unsur <i>why</i> (mengapa) menjelaskan alasan peristiwa tersebut terjadi. Dalam berita ini, terdapat tiga alasan utama yang ditonjolkan, yaitu adanya aturan yang melarang siswa mengikuti pembelajaran jika belum membayar SPP, kondisi ekonomi keluarga yang menyebabkan keterlambatan pembayaran, serta informasi tambahan mengenai adanya faktor eksternal keterlambatan tersebut. Faktor tersebut disebabkan oleh bantuan uang pendidikan belum cair.
How	- Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena sudah dua hari dihukum belajar di lantai oleh gurunya, dari jam masuk sekolah pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB. - Di video yang diunggah akun Instagram @medanheadlines.news, tampak ibu dari siswa SD tersebut, Kamelia (38), mendatangi sekolah dan menyaksikan langsung anaknya duduk di lantai. "Malu loh Mak ke sekolah. Kenapa malu? (Saya) disuruh duduk di semen, gara-gara belum ambil rapot lah sejak Senin sampai Selasa'," ujar Kamelia menirukan ucapan anaknya. - Kepala Sekolah Abdi Sukma, Juli Sari, mengungkapkan bahwa awalnya ia tidak mengetahui bahwa siswa kelas IV SD tersebut diminta duduk di lantai saat proses belajar berlangsung di sekolah.	Unsur <i>how</i> (bagaimana) menggambarkan kronologi peristiwa tersebut secara keseluruhan. Peristiwa dimulai dari pemberian hukuman oleh wali kelas yang meminta siswa duduk di lantai selama jam pelajaran, kemudian hal itu diketahui oleh orang tua korban melalui cerita anaknya. Selanjutnya, ibu korban mendatangi sekolah dan menyaksikan hal tersebut secara langsung, hingga akhirnya muncul klarifikasi dari kepala sekolah yang menyatakan adanya miskomunikasi.

	• "Wali kelasnya membuat peraturan sendiri di kelasnya bahwa kalau anak tidak ada menerima rapor, tidak boleh menerima pelajaran dan mendudukkan siswa tersebut di lantai saat pelajaran berlangsung, tanpa kompromi dengan pihak sekolah," kata dia. • Senin pekan depan, sekolah akan melakukan rapat dengan ketua yayasan dan bendahara untuk memutuskan sanksi kepada wali kelas tersebut.	
Struktur Tematik		
Detail	• "Kamelia mengakui anaknya menunggak uang sekolah hingga tiga bulan karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun 2024 belum cair." • "Sementara, dia terdesak kebutuhan ekonomi mengingat suaminya hanya bekerja sebagai tukang bangunan." • "Kamelia mengatakan, rencananya dia mau membayar uang sekolah pada Rabu (8/1/2025). Dia ingin menjual ponsel terlebih dahulu untuk biaya sekolah anaknya." • "Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena sudah dua hari dihukum belajar di lantai oleh gurunya, dari jam masuk sekolah pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB." • "Malu loh Mak ke sekolah... disuruh duduk di semen." • "Sebenarnya anak itu tidak menerima rapor karena belum melunasi SPP. Tapi tidak jadi permasalahan sebenarnya dan tetap bisa mengikuti pelajaran." • "Wali kelasnya membuat peraturan sendiri di kelasnya bahwa kalau anak tidak ada menerima rapor, tidak boleh menerima pelajaran dan mendudukkan siswa tersebut di lantai saat pelajaran berlangsung, tanpa kompromi dengan pihak sekolah." • "Saya sebagai kepala sekolah sudah memohon maaf sama	Media ini menampilkan tiga detail utama, yaitu kondisi korban, latar belakang ekonomi keluarga, serta klarifikasi dari pihak sekolah.

	orangtua, sudah selesai sebenarnya permasalahan ini.” • “Senin pekan depan, sekolah akan melakukan rapat dengan ketua yayasan dan bendahara untuk memutuskan sanksi kepada wali kelas tersebut.”	
Koherensi	Koherensi Sebab-akibat • MA, seorang siswa kelas IV SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara, dihukum gurunya berinisial H belajar di lantai, hanya karena belum membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). • Kamelia mengakui anaknya menunggak uang sekolah hingga tiga bulan karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun 2024 belum cair. • Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena sudah dua hari dihukum belajar di lantai oleh gurunya, dari jam masuk sekolah pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB. • Diakui Juli, siswa tersebut belum melunasi SPP dan karena itu belum dapat menerima rapor. Koherensi Kronologis • "Kemudian, sebelum anaknya masuk sekolah, wali murid mengumumkan di grup WhatsApp orangtua murid bahwa siswa yang belum membayar uang sekolah tidak diperkenankan belajar." • "Lalu, saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi." Koherensi Pertentangan • "Sebenarnya anak itu tidak menerima rapor karena belum melunasi SPP. Tapi tidak jadi permasalahan sebenarnya dan tetap bisa mengikuti pelajaran."	Pada berita ini digunakan tiga koherensi yaitu koherensi sebab-akibat dan koherensi kronologis, da koherensi pertentangan.
Bentuk	Kalimat Aktif	Pada unsur bentuk kalimat, berita ini menggunakan

Kalimat	• Diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjend Katamso, Kota Medan, Kamelia menjelaskan duduk perkara peristiwa memilukan yang menimpa anaknya. • Kamelia mengakui anaknya menunggak uang sekolah hingga tiga bulan karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun 2024 belum cair. • Kamelia sempat meminta dispensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah. • Kemudian, sebelum anaknya masuk sekolah, wali murid mengumumkan di grup WhatsApp orang tua murid bahwa siswa yang belum membayar uang sekolah tidak diperkenankan belajar. • Kamelia mengatakan, rencananya dia mau membayar uang sekolah pada Rabu (8/1/2025). • Dia ingin menjual ponsel terlebih dahulu untuk biaya sekolah anaknya. • Lalu, saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. • Juli menegaskan bahwa pihak yayasan tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan siswa yang belum membayar SPP untuk belajar di lantai. • Menurutny, wali kelas tersebut membuat peraturan sendiri tanpa ada konfirmasi ke dia terlebih dahulu. • Juli mengaku sudah memanggil wali murid dan wali kelas secara langsung. • Sebagai kepala sekolah, dia sudah meminta maaf kepada orang tua siswa tersebut. • Senin pekan depan, sekolah akan melakukan rapat dengan ketua yayasan dan bendahara untuk memutuskan sanksi kepada wali kelas tersebut. Kalimat Pasif	bentuk kalimat aktif dan pasif. Bentuk kalimat aktif lebih dominan digunakan untuk menyampaikan tindakan yang dilakukan oleh narasumber atau pihak-pihak yang terlibat, seperti orang tua korban, kepala sekolah, dan pihak sekolah. Sementara itu, bentuk kalimat pasif digunakan pada bagian-bagian tertentu untuk menempatkan korban sebagai pihak yang menerima tindakan, misalnya melalui penggunaan verba dihukum, diminta, didudukkan, tidak diperkenankan, dan diberlakukan. Penggunaan bentuk kalimat tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com tidak hanya menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak, tetapi juga memberikan penekanan terhadap pengalaman yang dialami korban sehingga memperkuat sudut pandang pemberitaan yang berorientasi pada korban.
-----------------------	---	--

	• MA, seorang siswa kelas IV SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara, dihukum gurunya berinisial H belajar di lantai, hanya karena belum membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). • Kepala Sekolah Abdi Sukma, Juli Sari, mengungkapkan bahwa awalnya ia tidak mengetahui bahwa siswa kelas IV SD tersebut diminta duduk di lantai saat proses belajar berlangsung di sekolah. • "Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukkan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis," kata dia. • Kemudian, sebelum anaknya masuk sekolah, wali murid mengumumkan di grup WhatsApp orang tua murid bahwa siswa yang belum membayar uang sekolah tidak diperkenankan belajar. • Kamelia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah.	
Kata Ganti	• Kamelia (38) ibu dari siswa SD kelas IV di Medan • "Saya pikir itu cuma kata-kata saja," ujar Kamelia kepada wartawan di rumahnya, Sabtu (10/1/2025). • "'Anak ibu sudah saya suruh pulang, tetapi dia tidak mau pulang'. Jadi dia tidak boleh belajar? Kata saya, terus saya bilang, 'dulu saya sekolah, tapi tidak gini juga caranya, dihukum kayak gini'," ujar Kamelia menceritakan perdebatan dengan wali murid anaknya. • Kepala Sekolah Abdi Sukma, Juli Sari, mengungkapkan bahwa awalnya ia tidak mengetahui bahwa siswa kelas IV SD tersebut diminta duduk di lantai saat proses belajar berlangsung di sekolah. • Juli menegaskan bahwa pihak yayasan tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan siswa yang belum membayar SPP untuk belajar di lantai.	Penggunaan kata ganti pada berita ini ditemukan di bagian awal berita. Media ini menggunakan nama lengkap serta identitas narasumber, seperti "Kamelia (38)" dan "Kepala Sekolah Abdi Sukma, Juli Sari" untuk menjelaskan posisi pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Penyebutan identitas narasumber berfungsi memperkuat kredibilitas informasi yang disampaikan. Di bagian pertengahan hingga akhir berita, media tidak lagi secara konsisten menggunakan nama lengkap, melainkan beralih pada penyebutan yang lebih sederhana seperti "Kamelia", serta penggunaan kata ganti seperti "dia" dan "-nya". Selain itu, dalam kutipan langsung, narasumber menggunakan kata ganti orang pertama seperti "saya", yang menunjukkan posisi personal dan keterlibatan langsung dalam peristiwa.

	• "Saya sebagai kepala sekolah sudah memohon maaf sama orangtua, sudah selesai sebenarnya permasalahan ini," kata Juli.	
Struktur Retoris		
Idiom	dihukum dan kayak pengemis	Kata “dihukum” merepresentasikan tindakan pelaku sebagai bentuk konsekuensi atas kesalahan yang dianggap dilakukan korban. Sementara itu, ungkapan “kayak pengemis” yang diutarakan oleh teman-teman korban menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang terhadap peristiwa tersebut. Teman korban menafsirkan kejadian itu sebagai perlakuan yang merendahkan martabat seseorang. Dengan demikian, penggunaan kata “dihukum” dalam berita tersebut dapat dimaknai sebagai tindakan yang bersifat merendahkan.
Grafis		Gambar yang disajikan memperlihatkan sosok ibu dari siswa yang tengah menjalani wawancara di dalam sebuah ruangan. Ekspresi wajah ibu korban yang ditampilkan, serta latar tempat yang sederhana, merepresentasikan kondisi ekonomi korban. Penggunaan elemen grafis tersebut turut mengarahkan pembaca untuk menumbuhkan empati terhadap korban.



Kode Batang Instrumen Penelitian Analisis Framing Pemberitaan Kasus Perundungan di Lingkungan Sekolah pada Media Online Kompas.com dan Detik.com

RIWAYAT HIDUP



Sepriana Anggraeni Sijabat lahir di Pekanbaru pada 29 September 2004. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan suami istri Bapak Leonardi Sijabat dan Ibu Simanjuntak. Penulis merupakan warga negara Indonesia dan beragama Kristen Protestan. Kini penulis tinggal di

Baktisraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penulis menempuh pendidikan pertama di TK Sari Asih dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 010 Sungai Bawang pada tahun 2016. Setelah itu, penulis meneruskan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 4 Singingi dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis kembali menempuh pendidikan di SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan perjalanan akademiknya ke salah satu perguruan tinggi bergengsi di pulau bali, yaitu di Universitas Pendidikan Ganesha dengan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Sembari melaksanakan kewajiban akademik, penulis aktif berkegiatan di organisasi yang disediakan oleh kampus. Penulis aktif sebagai anggota organisasi di HMJ BSID selama 2 periode, bergabung dalam kegiatan organisasi keagamaan, dan kepanitiaan yang diselenggarakan oleh BEM FBS dan BEM Rema Undiksha. Perjalanan akademik yang dilalui penulis memberikan banyak hal positif dalam kehidupan penulis. Penulis belajar mengenai rasa tanggung jawab, kerja sama tim, cara menyampaikan pendapat, musyawarah, dan banyak pengalaman lainnya.